

Laporan Kinerja (LKJ)

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 515867, 586795, 515866
Fax.(0274) 586795.

EMAIL : pupkp@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.g.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja (LKJ) OPD Tahun 2018 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah .

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

KEPALA

Agus Tri Haryono, ST.MT
NIP. 19720306 1996031 004

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja (LKJ) OPD Tahun 2018 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah .

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

KEPALA

Agus Tri Haryono, ST.MT
NIP. 19720306 1996031 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 . Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. **Sasaran 1: Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat**

Dengan Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Formula Indikator : 50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya

Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2018 adalah 75,37 % dari target 74,83 % atau tercapai **100,72 %**

b. **Sasaran 2: Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat**

Dengan Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Formula Indikator : 70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai .

Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2018 adalah **90,17 %** dari target **90,32 %** atau tercapai **100,16 %**

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Fungsi dan Tugas.....	3
3. Keadaan Pegawai.....	4
4. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
5. Keuangan.....	7
6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	9
1. Perencanaan Strategis	9
Tujuan dan Sasaran.....	10
2. Rencana Anggaran Tahun 2018.....	11
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	17
1. Capaian Kinerja Tahun 2018	18
2. Realisasi Kinerja Tahun Lalu	19
3. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra	20
4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	21
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	21
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
7. Analisis Program /Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	24
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

1.1 Struktur Organisasi

1.2 Fungsi dan Tugas

1.3 Keadaan Pegawai

1.4 Keadaan Sarana
dan Prasarana

1.5 Keuangan

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

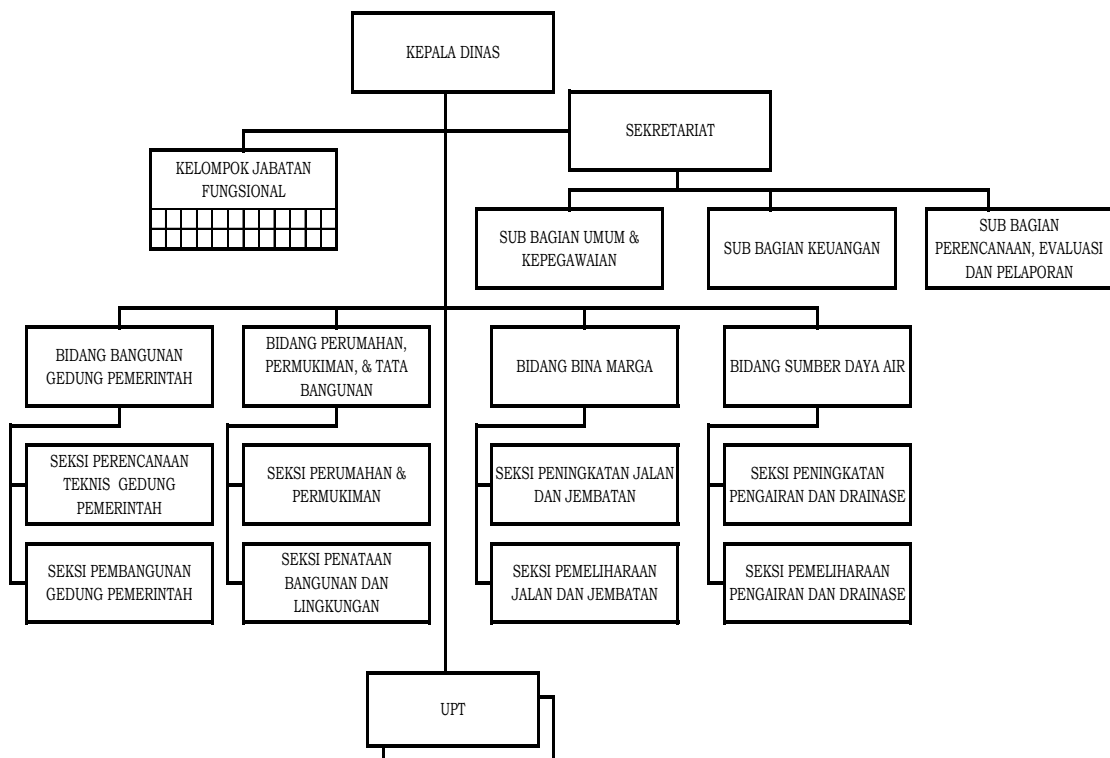
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 93/ tahun 2017
TANGGAL : 27 November 2017

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi

1. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Secara umum fungsi dari sekretariat adalah menjalankan fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

1. Bidang Sumber Daya Air , terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase ;
- b. Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi pengelolaan kebinamargaan.

3. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah , terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah ;
- b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah .

Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi pengelolaan gedung pemerintah kota yogyakarta

4. Bidang Perumahan,Permukiman dan Tata Bangunan, terdiri dari:

- a. Seksi Perumahan dan Permukiman ;
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan .

Bidang Perumahan,Permukiman dan Tata Bangunan mempunyai fungsi pengelolaan penataan Perumahan,Permukiman dan Tata Bangunan

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa merupakan tambahan penyedia layanan publik bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) sederhana untuk masyarakat Kota Yogyakarta berpenghasilan rendah.

6. Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum melaksanakan penyediaan pelayanan publik dengan menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan penerangan jalan umum.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah melaksanakan penyediaan pelayanan publik dengan menyiapkan pelaksanaan teknis operasional , evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pengelolaan air limbah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang-bidang infrastruktur dan prasarana wilayah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dinas, didelegasikan ke masing-masing bidang dan seksi-seksi yang ada sesuai susunan organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Adapun dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terdapat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang terbentuk melalui Peraturan Walikota No 137 Tahun 2017 yaitu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pengelolaan Air Limbah , Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Penerangan Jalan Umum dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pengelolaan Rumah Susun. Masing–masing subbag, bidang dan seksi yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

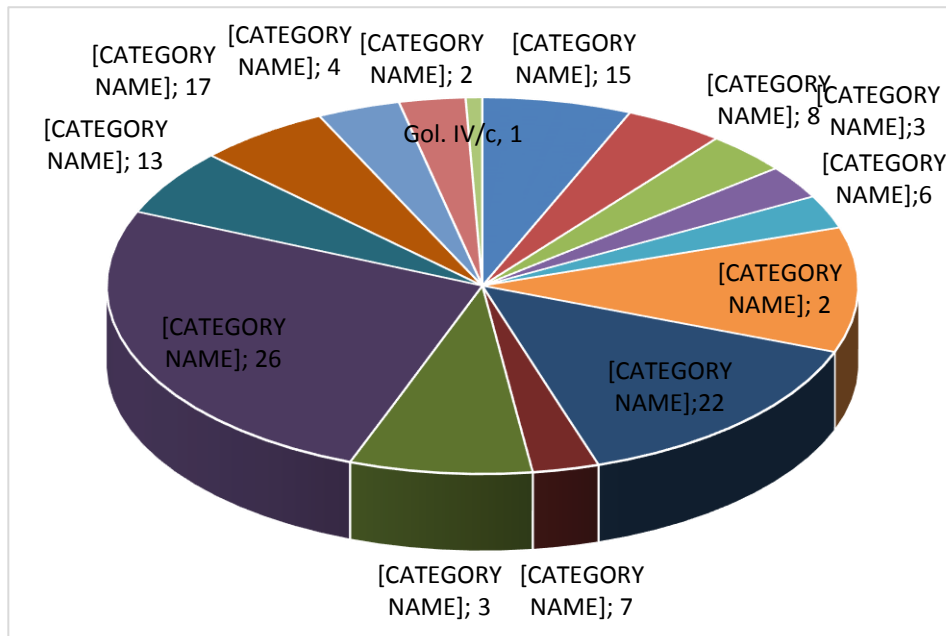
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman

1.3 Keadaan Pegawai

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terdiri atas 128 orang dengan rincian 113 orang PNS/CPNS dan 15 orang naban dengan gambaran sesuai grafik di bawah ini.

Grafik 1.1. Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Naban



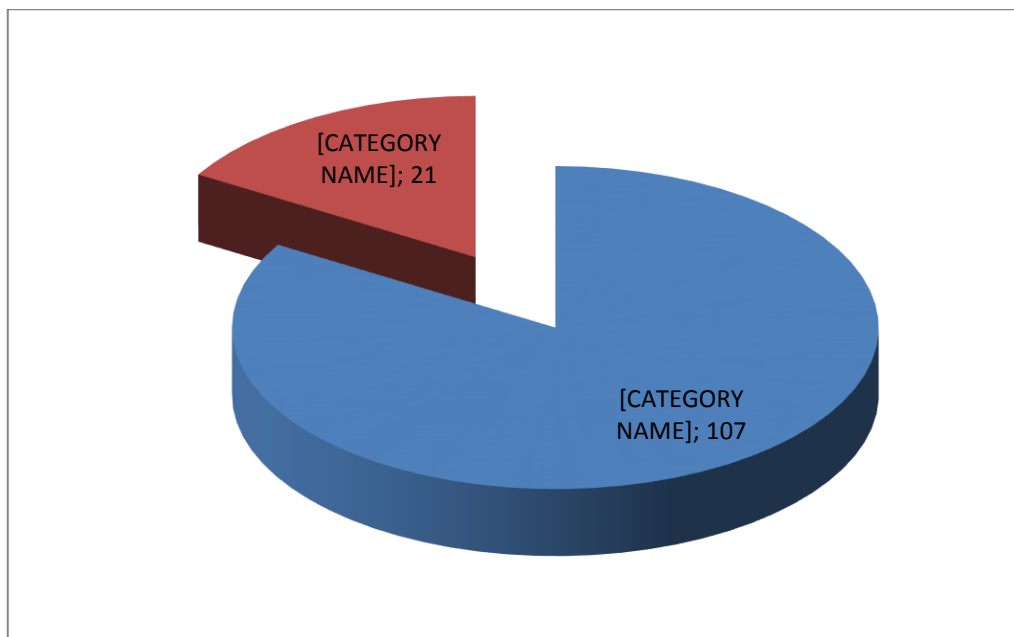
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang pengairan, drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman, perumahan .

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang-bidang infrastruktur dan prasarana wilayah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2017 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pasal 6 sampai dengan 17. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi , Kedudukan, Fungsi , Tugas dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Selanjutnya pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin tergambar pada grafik di bawah ini.

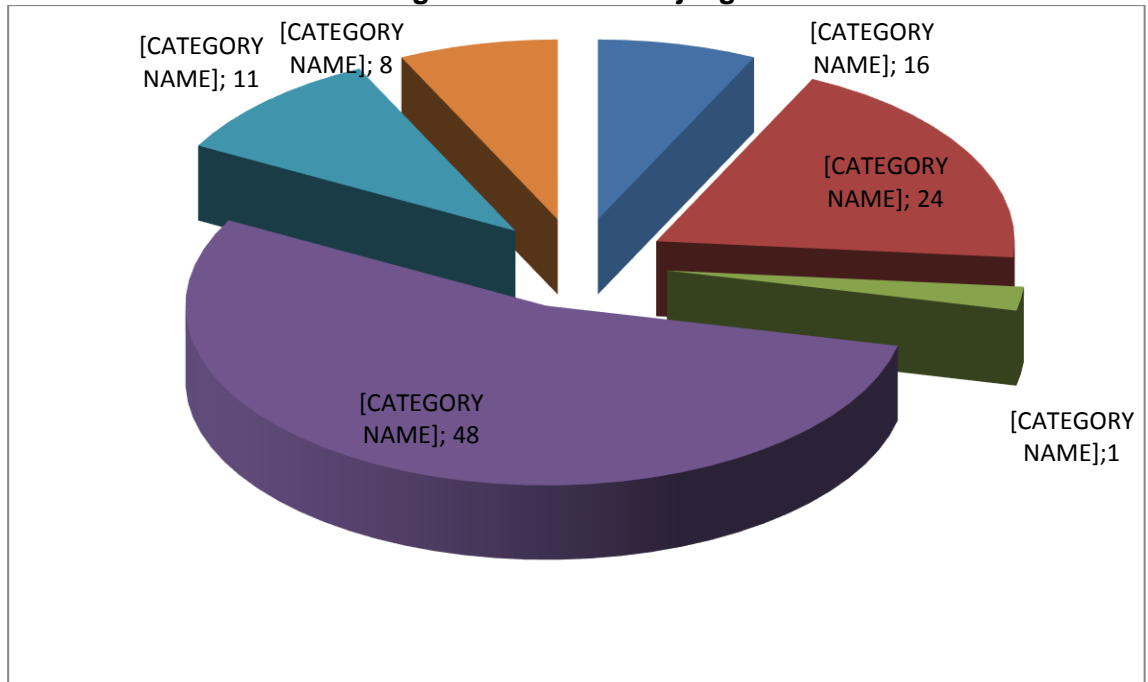
Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Bagan 1

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2018

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Guna mendukung fungsi manajemen pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Tabel. 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Per 31 Desember 2018

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 6	18	-	-	18
3	Kendaraan Roda 4	17	-	2	19
4	Kendaraan Roda 3	18	-	-	18
5	Kendaraan Roda 2	15	-	-	15
6	Komputer Desktop	25	6	6	37
7	Komputer Laptop	4	-	-	4
8	Printer	24	2	2	28
9	UPS	21	1	8	30

Sumber data

10	Air Conditioning	<u>14</u>	-	-	<u>14</u>
----	------------------	-----------	---	---	-----------

1.5 Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian disajikan pada tabel 1.5

Tabel.1.5
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang
Dikelola Dinas PUPKP Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2018

4.	PENDAPATAN	1.075.968.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	690.000.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	385.968.000
5	BELANJA	148.889.689.735
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.648.951.999
5.1.1	Belanja Pegawai	6.648.951.999
5.2	Belanja Langsung	142.240.737.736
5.2.1	- Belanja Pegawai	515.041.434
5.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	31.306.688.871
5.2.3	- Belanja Modal	110.419.007.431

Sumber data : DPPA DPUPKP Kota Yogyakarta TA. 2018

1.1 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat sasaran, strategi, kebijakan serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja .

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Lampiran-lampiran

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi:

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*

1. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memotivasi Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang di dalamnya termasuk urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan yang menjadi tugas dan tanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk melaksanakan semua urusan tersebut diatas dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Nomor 118/112 tahun 2017.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah Suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman agar berhasil efektif dan efisien.

Dalam Rencana Strategis disusun sesuai sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

1.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan dan Indikator Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah kota Yogyakarta pada misi ke 6 (enam) Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah “ **Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat** “ dengan indikator tujuan mengukur Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman dengan target **79,43** % .

b.Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan, dengan mengukur Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan target **74,83** %, serta
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan, dengan mengukur Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan target **90,17** %

c. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dengan program- program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
- Program Pembangunan Gedung Pemerintah
- Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan

Serta didukung program-program yang terdapat dalam pelayanan internal Dinas pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
- Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

d. Rencana Aksi

Tujuan, sasaran, program serta tolak ukur untuk mencapai indikator-indikator tersebut diatas dituangkan dalam rencana aksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .

Adapun tabel rencana aksi terdapat dalam lampiran .

2. Rencana Anggaran Tahun 2018

Rencana Anggaran Tahun 2018 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terdiri dari Anggaran Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018

Uraian	Target	Capaian
Retribusi Daerah	Rp. 690.000.000,-	95 %
Pendapatan Lain-Lain yang SAH	Rp. 385.968.000 ,-	95 %
Jumlah	Rp.1.075.968.000,-	95 %

Pada Tahun Anggaran Tahun 2018 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran belanja Rp.148.889.689.735,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.648.951.999,- dan Belanja Langsung Rp 142.240.737.736,-

Tabel 2.2
Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018

Uraian	Target	Capaian
Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.648.951.999,-	98 %
Belanja Langsung	Rp.142.240.737.736,-	95 %
Jumlah	Rp.148.889.689.735,-	96,50 %

Alokasi Anggaran Pelayanan Internal

Untuk mendukung terselenggaranya program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diperlukan operasional dinas yang membutuhkan anggaran rutin demi terselenggaranya kelangsungan suatu rutinitas dinas yang dibiayai dari APBD Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 yang diakomodir dalam program pelayanan internal sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Belanja Program Pelayanan Internal
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program /Tolak Ukur	Target Program	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %	2.209.402.979,-

	- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung /Bangunan Kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100 %	723.504.284,-
3	Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	80.000.000,-

Kinerja SKPD			
--------------	--	--	--

2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	84 % dan 30 % (untuk Indikator PJU)	60.753.021.641,-	3 Kegiatan
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	73,50 % dan 87,63 % (untuk indikator Drainase)	38.000.550.695,-	2 Kegiatan
			Pembangunan Gedung Pemerintah	87 %	20.679.526.740,-	2 Kegiatan
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	93 % dan 83,55 % (untuk Indikator Saluran Air Limbah	17.682.590.541,-	3 Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, terdapat dukungan dana dari pusat melalui dana Keistimewaan (Danais) DIY yang mendukung program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yaitu Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru dengan anggaran sebesar Rp. 11.775.000.000,- dan Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten/DED sirip-sirip kawasan Malioboro Rp. 218.525.000,-

3 . Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta maka diperlukan rencana kerja. Program kerja yang ada terdiri 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018 tertuang dalam program dan kegiatan merupakan hasil musyawarah bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran yang selaras dengan sasaran daerah dalam RPJMD yang berupa “Infrastruktur Pelayanan Publik Meningkatkan “ maka disusun Indikator kinerja utama yang berlaku 5 tahun (terdapat dalam lampiran) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berlaku 1 tahun yang terdiri dari 2 Indikator sasaran, tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	74,83 %
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	90,17 %

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	74,83 %
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	90,17 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Gedung Pemerintah	Rp. 22.791.667.596,-	APBD
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 60.753.021.641,-	APBD
3	Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Rp. 38.000.550.695,-	APBD
4	Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Rp. 17.682.590.541,-	APBD

Pada Tahun 2018, karena petunjuk teknis mengenai standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat , masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan maka belum dapat digunakan sebagai ukuran terhadap keberhasilan kinerja kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

BAB 3

Bab 3 Berisi:

A. Capaian Kinerja
Tahun 2018

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Persentase Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan mendasar kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 dan Perubahan Kinerja Tahun 2018 Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Infrastruktur Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan Tahun 2018

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	79,43 %	79,85 %	100,52 %	Sangat Tinggi

Adapun Rumusan Formula Indikator Tujuan sebagai berikut :

Target :

70 % Indeks Pekerjaan Umum + 30 % Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
 $70 \% (74,83 \%) + 30 \% (90,17 \%) = 79,43 \%$

Realisasi :

70 % Indeks Pekerjaan Umum + 30 % Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
 $70 \% (75,37 \%) + 30 \% (90,32 \%) = 79,85 \%$

Pencapaian melebihi target karena ada nya kenaikan realisasi dari target sasaran kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat dari target 74,83 % terealisasi 75,37 %.(100,72 %) dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat dari target 90,17 terealisasi 90,32 % (100,16 %).

Sedangkan Indikator tujuan berasal dari Indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, adapun capaian indikator tujuan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun 3.3
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kode
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	74,83 %	75,37 %	100,72 %	Sangat tinggi
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	90,17 %	90,32 %	100,16 %	Sangat Tinggi

2. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2018 yang merupakan tahun pertama RPJMD 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Pengukuran Indikator Tujuan dengan Tahun Sebelumnya

No Sa sar an Str ate gis	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi		20 18		Capaian (%)	Kode
			2016 (%)	2017 (%)	Target (%)	Reali sasi (%)		

1.	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	0	78,01	79,43	79,85	100,52	Sangat Tinggi
----	---	---	---	-------	-------	-------	--------	---------------

Tabel 3.5
Pengukuran Indikator Sasaran Strategis dengan Tahun Sebelumnya

No Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		20 18		Capaian (%)	Kode
			2016 (%)	2017 (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
1.	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	0	73,20	74,83	75,37	100,72	Sangat Tinggi
2.	Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Perumahan	0	89,23	90,17	90,32	100,16	Sangat Tinggi

	Perumahan dan Permukiman Meningkat	dan Permukiman Meningkat							
--	------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi Kinerja tahun 2018 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)					Realisasi Tahun 2 (%)
					I	II	III	IV	V	
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	73,20	74,83	78,07	80,58	83,10	75,37
			Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	89,23	90,17	91,16	92,38	93,55	90,32

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dalam dokumen perencanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan , tetap berkaitan kepada

program yang ada dalam dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun untuk penentuan Indikator dalam Tujuan, Sasaran, maupun Program tidak menggunakan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena pada tahun 2018 belum ditetapkan petunjuk teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk perhitungan indikator dalam SPM, dan masih dalam pembahasan di level pusat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2018 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra, dengan tercapainya indikator tujuan maupun sasaran sebesar lebih dari 100 %, Indikator tujuan dengan target 79,43 % yang berasal dari 70 % indeks pekerjaan umum + 30 % indeks perumahan dan permukiman terealisasi 79,85 % atau tercapai 100,52 %

Sedangkan indikator sasaran, untuk indikator sasaran 1 indeks infrastruktur pekerjaan umum meningkat 74,83 % tercapai 75,37 % dan indikator sasaran 2 indeks perumahan dan permukiman meningkat 90,17 % tercapai 90,32 %

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta perumahan dan permukiman yang nyaman dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun anggaran- anggaran dari pusat serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran melalui penataan pedestrian kawasan kotabaru melalui dana keistimewaan (Danais) .

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun pertama Renstra hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota.

6. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat, serta sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun tabel Analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7

Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 180 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 128 orang. Berkurang 1 orang dari tahun	Masih dibutuhkan 52 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang

	sebelumnya 129 orang.	yang sesuai	kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan .
Sumber Dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan infrastruktur kota	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan infrastruktur kota walaupun belum semua titik dapat tertangani dengan alasan membutuhkan biaya yang besar	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.	Mengajukan usulan anggaran ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun Dana Keistimewaan (Danais)
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Sarana Prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum dapat dipergunakan secara bersama untuk menjangkau infrastruktur di semua kecamatan .	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar terjangkau ke seluruh wilayah kota Yogyakarta	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 capaian dari output kegiatan tersebut, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2018, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Tolak Ukur Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	84 %	84 %
			- Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	26.425 m2	26.425 m2
				Penyusunan DED	2 dok	2 dok
				Master Plan Pedestrian Jalur H	1 dok	1 dok
			- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan	16.500 m2	16.500 m2
				Dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok
				Assesment Jembatan	1 Dok	1 Dok
			- Pengelolaan Penerangan	Persentase Kualitas	30 %	33,63 %

			Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan		
				Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1900 titik	1900 titik
				Penggantian lampu PJU Habis Umur Pakai	577 titik	577 titik
				Pembayaran Rekening Air dan Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan
				Peningkatan PJU Kampung	185 titik	185 titik
				Peningkatan PJU Lingkungan	470 titik	470 titik
				Pendataan PJU	1 dok	1 dok
				Dokumen Perencanaan	9 dok	9 dok
				Pemeliharaan Lampu Hias	13 unit	13 unit
				Pemeliharaan /Pergeseran Tiang Listrik, Sirene dan Pengecatan Lampu antik	1 pekerjaan	1 pekerjaan

			Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	73,50 %	73,50 %
				Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	87,63%	87,63 %
			- Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	1913,83 m	1913,83 m
				Pendataan dan Pemetaan Saluran Irigasi berbasis SIG	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyusunan DED	11 Dokumen	11 Dokumen
			- Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	1937 m	1937 m
				Penyusunan DED	6 Dokumen	6 Dokumen
				Review Perencanaan Saluran Irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen

	Review Perencanaan SAH Tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pendataan dan Pemetaan Sedimentasi Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase Pemenuhan Bangunan Bangunan Gedung Sesuai Standar Kebutuhan	87 %	87 %
- Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Rapor Penilaian Penyedia Jasa Konstruksi	1 dokumen	1 dokumen
	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi	2 laporan	2 laporan
	Laporan Forum Komunikasi dan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penyedia Jasa Konstruksi	1 laporan	-
	Updating Data	12 laporan	12

				Ledger Bangunan		laporan
				Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	1 dokumen	1 dokumen
				Pembinaan/Pe ndampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	16 dokumen	16 dokumen
				Penyusunan Perwal IMB,SLF,TPT dan Pendataan Bangunan Gedung	1 dokumen	1 dokumen
				Pembangunan Kantor SKPD	1 lokasi	1 lokasi
				Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	2 pekerjaan	2 pekerjaan
				Renovasi Bangunan Pemerintah	23 lokasi	23 lokasi
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar Permukiman	93 %	93 %

			Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	84 %	84,05 %
		- Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersebar	4 unit	4 unit
			Sambungan Rumah	175 SR	201 SR
			Pekerjaan Talud Permukiman	244,90 m	285,34 m
			Pendataan Septiktank MBR	1 Dokomen	1 Dokumen
			DED Sarpras Permukiman	5 Dokumen	7 Dokumen
			Pemeliharaan SAL	80 m	80 m
		- Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Kawasan	2 kawasan	2 kawasan
			Peningkatan Kualitas RTLH	172 unit	192 unit
			RTLH	172 unit	192 unit
			Penyusunan DED	9 Dokumen	9 Dokumen
			Penyusunan LARAP	2 Dokumen	2 Dokumen
		- Pengelola	Operasional	2 unit	2 unit

			Rusunawa	Pengelolaan Rusunawa		
				Pendataan Penghuni	1 Dokumen	1 Dokumen
			- Pengelolaan Saluran Air Limbah	Operasional Pengelolaan Saluran Air Limbah	715 m	715 m

7.1 Analisis Pencapaian Program

- Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator Program :

- a. Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan
Pelengkap Jalan 84 %

Formula Indikator : $\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kota}} \times 100 \%$

$$\frac{196 \text{ km}}{233 \text{ km}} \times 100 \% = 84 \%$$

Dengan terealisasinya tolak ukur pekerjaan peningkatan jalan sebesar 26.425 m² dan pemeliharaan jalan sebesar 17.850 m² , sehingga menambah indikator jalan kondisi mantap di tahun 2018 sesuai dengan yang ditargetkan atau tercapai 100 % .

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada

pekerjaan fisik di lapangan

2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- b. Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan 30 %

Formula Indikator : Jumlah PJU Ramah Lingkungan x 100 %

Jumlah Titik PJU

$$\frac{8.680 \text{ titik}}{25.811 \text{ titik}} \times 100 \% = 33,63 \%$$

25.811 titik

Indikator yang digunakan saat ini adalah PJU ramah lingkungan atau yang menggunakan LED , dari target 30 % terealisasi 33, 63 % atau tercapai 112 %.Pencapaian target lebih dari 100 %, dikarenakan penambahan volume karena adanya sisa lelang.

- Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase

Indikator Program :

- Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud 73,50 %

Formula Indikator : Panjang Talud/Saluran Kondisi Baik x 100 %

Total Panjang Talud Saluran Pengairan

$$\frac{216.765 \text{ m}}{294.912 \text{ m}} \times 100 \% = 73,50 \% \text{ atau pencapaian } 100 \%$$

294.912 m

- Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat 87,63 %

Formula Indikator : Panjang Saluran Drainase yang Terbangun x 100 %

Total Panjang Saluran Drainase

$$\frac{435.550 \text{ m}}{497.000 \text{ m}} \times 100 \% = 87,63 \% \text{ atau pencapaian } 100 \%$$

497.000 m

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi

di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan

2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- Program Pembangunan Gedung Pemerintah

Indikator Program : Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Sesuai Standar Kebutuhan 87 %

Formula Indikator : $\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah direhab} \times 100 \%}{\text{Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah}}$

$$\frac{1409 \text{ unit}}{1620 \text{ unit}} \times 100 \% = 87 \% \text{ atau pencapaian } 100 \%$$

1620 unit

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan

2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana
Tindak Lanjut :
 - a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
 - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan

Indikator Program :

- Persentase Kualitas Sarana Prasarana Dasar Permukiman 93 %

Formula Indikator : Kawasan Dengan Sarana Prasarana Baik x 100 %

$$\frac{\text{Total Kawasan Kota}}{3250 \text{ ha}} = \frac{3022,50 \text{ ha}}{3250 \text{ ha}} \times 100 \% = 93 \%$$

- Persentase Cakupan Saluran Air Limbah Yang Mewadahi 83,55 %

Formula Indikator : Jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) x 100 %

$$\frac{\text{Jumlah tangki septik yang dimiliki}}{909 \text{ unit}} = \frac{764 \text{ unit}}{909 \text{ unit}} \times 100 \% = 84,05 \%$$

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan seperti adanya bencana kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

- a. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.9

Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Retribusi Daerah	Rp. 690.000.000 ,-	Rp. 704.992.500 ,-	102,17
Pendapatan Lain-Lain yang SAH	Rp. 385.968.000 ,-	Rp. 322.425.600 ,-	83,54
Jumlah	Rp.1.075.968.000,-	Rp. 1.027.418.100,-	95,49

Analisis Pencapaian target :

Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Retribusi Daerah

- **Retribusi Jasa Umum** yang merupakan retribusi pengolahan limbah cair dengan target

Rp. 680.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 690.682.500,- atau tercapai 101,57 % .

Adapun tercapainya target dikarenakan sebagai berikut :

1. Monitoring Evaluasi terkait retribusi secara intensif dan terjadwal
2. Dilaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkala.
3. Penambahan sarana prasarana .
4. Tingkat kesadaran WR untuk membayar masih rendah.

Langkah-langkah kedepan adalah sebagai berikut

1. Pembinaan / sosialisasi bagi WR (wajib Retribusi)
 2. Merencanakan sistem pembayaran non tunai untuk mengurangi ketugasan petugas retribusi yang terbatas
- **Retribusi Jasa Usaha** yang merupakan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa toilet mobil dengan target Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 14.310.000 ,- atau tercapai 143,10 % dikarenakan banyaknya permintaan sewa untuk even-even acara yang membutuhkan pemakaian toilet mobil.

2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan dari barang milik yang merupakan sewa gedung Rusunawa dengan anggaran sebesar Rp. 385.968.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 322.425.600 ,- atau capaian sebesar 83,54 %

Alasan pencapaian target sebagai berikut :

- Tarif ditentukan SK Walikota dengan tarif rendah
- Masih terdapat penghuni yang berada di Rusunawa Cokrodirjan yang menunggak dalam pembayaran sewa .

Solusi /Tindak Lanjut :

- Mengusulkan pembangunan rusunawa sekelas dengan Rusunawa Griya Bina Harapan (GBH) Juminahan agar dapat menutup target yang tidak tercapai .

Belanja terdiri dari

- **Belanja Tidak Langsung** yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNS dengan anggaran sebesar Rp.6.648.951.999,- terealisasi Rp. 6.481.676.994,- atau tercapai 97,48 %
- **Belanja Langsung** merupakan belanja yang mendukung terselenggaranya program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran strategis. Belanja langsung terdiri dari 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 142.240.737.736 ,- terealisasi sebesar Rp. 138.415.514.926,08 atau tercapai 97,31 % .

Adapun pencapaian dapat dilihat pada tabel 3.10 ,3.11

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.648.951.999 ,-	Rp. 6.481.676.994 ,-	97,48
Belanja Langsung	Rp.142.240.737.736,-	Rp. 138.415.514.926,08,-	97,31
Jumlah	Rp.148.889.689.735,-	Rp. 144.897.191.920,08,-	97,32

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	97 %	60.753.021.641,-	59.083.856.576,64 (97,25 %)
			Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	97 %	38.000.550.695,-	37.217.940.335,18 (97,94 %)
			Pembangunan Gedung Pemerintah	96 %	22.791.667.596,-	21.956.140.507,26 (96.33 %)
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	97 %	17.682.590.541,-	17.200.102.347,72 (97,27 %)

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Program Internal

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97 %	2.209.402.979,-	2.158.374.740,28 (97,69 %)

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97%	723.504.284 ,-	719.682.819,- (99,47%)
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97 %	80.000.000 ,-	79.417.600 ,- (99,27%)

Analisis pencapaian target

Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) , Capaian Belanja Tidak Langsung sebesar 97,48 % dari target 98 % .dikarenakan berkurangnya gaji dan tunjangan PNS yang pensiun dan meninggal dunia di tahun 2018.

Belanja Langsung

Capaian anggaran belanja langsung 96,93 % dari target 95 % . Anggaran dengan serapan terbesar adalah anggaran yang mendukung sasaran strategis karena capaian anggaran fisik hampir semua terealisasi, karena target fisik terlampaui semua 100 % .

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi:

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan . Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja Perubahan untuk indikator sasaran kualitas infrastruktur pekerjaan umum meningkat tercapai 100,72 % dan sasaran kualitas perumahan dan permukiman meningkat tercapai 100,16 %.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran , walaupun pemeliharaan dilaksanakan berkesinambungan setiap tahun namun karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti musim penghujan yang lama dan tingginya debit air hujan mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar

tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah,serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja(PK);

3. Perlu penambahan anggaran untuk menuntaskan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase ;
4. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.